RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Bulan: September 2023

Oleh: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Sebelumnya, berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi II DPR RI, delapan fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna, sedangkan satu fraksi menyetujui dengan catatan.

Mendengar hal ini, Wakil Ketau DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Paripurna kemudian menanyakan kembali kepada seluruh fraksi yang hadir di Paripurna untuk meminta persetujuan terkait pengesahan pengganti UU ASN tersebut.

”Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dapat disahkan?” tanya Dasco yang kemudian dijawab ’setuju’ oleh seluruh fraksi yang hadir di Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun menanyakan terakhir kali kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir dalam Paripurna untuk meminta persetujuan terkait pengesahan UU ASN yang baru tersebut. ”Sekali lagi, kepada seluruh anggota Apakah RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disetujui menjad undang-undang?” tanyanya yang lagi dijawab ’setuju’ oleh seluruh peserta sidang.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung mengatakan pembahasan UU ASN yang baru ini butuh waktu yang sangat panjang, kurang lebih dua tahun sembilan bulan, sehingga diharapkan UU ASN ini bisa menjawab tantangan ASN ke depan agar terciptanya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik. ”Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera,” pungkasnya. (we/aha)

sumber: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46851/t/Pengganti%20UU%20ASN%20Resmi%20Disahkan%20di%C2%A0Rapat%20

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Revisi UU ASN Bentuk Perhatian pada Pengabdian Tenaga Honorer	https://www.dpr.go.id/berita/d \netail/id/46898/t/Revisi+UU+ASN \n+Bentuk+Perhatian+pada+Pengabd \nian+Tenaga+Honorer
Berita	RUU ASN Disahkan, Menteri PANRB: Tak Ada PHK Massal Honorer	https://setkab.go.id/ruu-asn-d \nisahkan-menteri-panrb-tak-ada- \nphk-massal-honorer/
Berita	RUU ASN Disahkan, Resmi Tak Ada PHK Massal untuk Tenaga Honorer	https://www.menpan.go.id/site/ \nberita-terkini/ruu-asn-disahka \nn-resmi-tak-ada-phk-masal-untu \nk-tenaga-honorer
Jurnal	Mengawal Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer melalui Revisi UU ASN	https://puslit.dpr.go.id/produ \nk/isu-sepekan
Jurnal	OPTIMALISASI PENGAWASAN BIROKRASI BERDASARKAN UU ASN YANG TELAH DIREVISI	chrome-extension://efaidnbmnnn \nibpcajpcglclefindmkaj/https:// \nberkas.dpr.go.id/puslit/files/ \ninfo_singkat/Info%20Singkat-XV \n-19-I-P3DI-Oktober-2023-2081.p \ndf
Buku	Integritas, Profesionalitas, dan Netralitas ASN	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n332&keywords=pegawai%20negeri% \n20sipil
Buku	Manajemen aparatur sipil negara	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n013&keywords=pegawai%20negeri% \n20sipil
Buku	Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil & persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n838&keywords=pegawai%20negeri% \n20sipil
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL	chrome-extension://efaidnbmnnn \nibpcajpcglclefindmkaj/https:// \nwww.kemhan.go.id/ropeg/wp-cont \nent/uploads/2019/03/PP_Nomor_1 \n1_Tahun_2017_PP_Nomor_11_Tahun \n_2017.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	chrome-extension://efaidnbmnnn \nibpcajpcglclefindmkaj/https:// \nndpr.go.id/dokjdih/document/pp/ \n1665.pdf
Undang-undang & Peraturan	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	chrome-extension://efaidnbmnnn \nibpcajpcglclefindmkaj/https:// \nwww.dpr.go.id/dokakd/dokumen/R \nJ2-20200225-052415-2561.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	chrome-extension://efaidnbmnnn \nibpcajpcglclefindmkaj/https:// \nndpr.go.id/dokjdih/document/uu/ \nUU_2014_5.pdf